

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penetapan Batas Wilayah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional peringatan setengah abad Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 26 Juni 2009
- George R Terry, 2000, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Cetakan keenam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno, 1985, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handoko, T. 2003, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu, SP, 2001, *Managemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 85.
- Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997.
- Nasir, Muhammad, 1980, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasution, S, 2002, *Metode Researsch*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Pamuji.S.,1994, *Ekologi Administrasi Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2
- Sugandha, Dann, N, 1995, *Koordinasi dalam Teori Praktek*, Bina Cipta, Bandung.
- Syafrudin, Ateng, 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito, Bandung.
- Thoha, Miftah 1994, *Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi*, Rajawali Press, Jakarta.

Internet, Koran/Majalah

Arsana, I Made Andi, 2006. *Arti Penting Penegasan Batas Wilayah Antar Daerah*, artikel dalam <http://geopolitical.boundaries.blogspot.com>
Sengketa 3 Blok, Bantul Kirim Surat ke Kemendagri” diunduh 18 April 2011,
dalam <http://kr.jogja.com>.

“Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah” diunduh 14 April 2011, dalam
<http://www.saepudin.wordpress.com>

”Menyoal Sengketa Batas Wilayah” diunduh 17 April 2011,
<http://www.bpn.go.id>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2006 tentang *Badan Pertanahan Nasional*

Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2006 tentang *Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang *Pedoman Penegasan Batas Daerah*

Maklumat Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 1948 tentang *Perubahan Daerah Kelurahan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta*

Internet Kontroversial

Arana, I. (2006). http://www.pengantar.com.
Dyana, artikel dalam http://www.pengantar.com.
Senyeka 3 Blok, Balai Kiri Sura ke Kemandari, diunduh 18 April 2011,
dalam http://www.pengantar.com.

"Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Jember", diunduh 14 April 2011, dalam
http://www.seputarjember.org

"Monev: Senyeka Basa Wilayah", diunduh 17 April 2011,
http://www.pengantar.com

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2008 tentang Badan Pertahanan Nasional

Peraturan Kepala BPN No 7 Tahun 2008 tentang Bidang Pengkajian dan
Peningkatan Kemampuan dan Kualitas Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2007 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional

Atkendum Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 1948 tentang Pembinaan Daerah
Kerajaan di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta